

Catatan Atas Tulisan G Sidharta

Soal Pembenahan Biennale-nya DKJ

Oleh: SUDARMAJI

TEPAT sekali judul yang diberikan oleh G. Sidharta dalam "PR" 19 Januari yl. Karena adat dunia tiadalah yang sempurna; melainkan hanya Tuhan sendiri yang sempurna, kekal dan maha, hingga tidak perlu pembenahan. Penulis catatan ini tidak sempurna dan pernah melakukan beberapa kekeliruan. Dan juga G. Sidharta sendiri. Ini dapat dibuktikan, jika tokoh beliau membaca katalog dengan sempurna, bukan hanya kulit katalognya saja, maka akan membaca kalimat ini: PAMERAN BIENNALE SENI LUKIS SENIOR KE 5 1982 DEWAN KESENIAN JAKARTA, dengan huruf kapital, di atas pengantar yang kebetulan saya tulis. Marilah kita uraikan pengertiannya.

Jika yang ditanyakan Dharta seni yang mana, jelas sudah terancam: seni lukis. Apakah semua karya lukis? Tidak. Hanya karya seniman senior. Apa kriterianya? Ada dalam pengantar. Yang ekstrinsik menyangkut usia, periode karya yang dihasilkan. Sedangkan yang intrinsik menyangkut kreativitas yang kontinyu dan cukup punya karakter. Bahwa orang boleh cocok atau tidak cocok dengan kriteria yang diajukan, barang lumrah. Kodrat dari nilai budaya (manusia) yang kwalitatif, (bukan kwantitatif) amat dapat diperdebatkan. Tapi ini soal lain. Sama juga peka dan debatablenya soal lomba seni, perjurian seni. Terdapat dua pihak yang masing-masing punya argumentasi dan sepanjang sejarah budaya tidak pernah ada yang menang atau kalah atau yang satu dapat meyakinkan yang lain. Sudah sama setuju untuk dijuri, sama sepakat dengan kriteria yang diajukan dan dijadikan pegangan saja, pada hasil penerapannya, orang masih bisa bersitegang. Apa sebabnya? Karena kodrat gejala budaya seni yang kwalitatif itu sendiri.

Saya kira kita tidak usah sampai menyuruk ke soal teori, filosofi atau khususnya epistemologi. Sudah terlalu gamblang. Kemudian jika orang ingin tanya lantas biennale yang seberapa, sudah tercantum juga di situ yang kelima. Dan predikatnya? Sudah jelas bukan internasional, bukan nasional, tetapi Desan Kesenian Jakarta yang seperti ada dalam pengantar katalog ditangani oleh anggota komite yang empat itu.

Disebut biennalena Dewan Kesenian Jakarta, karena seperti halnya sesudah lahirnya Desan di Jakarta lantas tumbuh banyak di kota lain Indonesia; siapa tahu jika Dewan Kesenian Samarinda,

Medan, Yogyakarta dan Bandung juga mau menyelenggarakannya sendiri. Untuk menanganai biennale yang a priori punya watak nasional, jika masih lahir dari rahim Desan Kesenian, logikanya lalah lahir dahulu itu Dewan Kesenian Nasional. Jika tidak, ya ditangani oleh Departemen P dan K yang jangkauan atau levelnya memang nasional. Tetapi pemerintah yang nasional itu sendiri belum berani menyelenggarakannya. Dijajagi kemungkinan untuk bisa menambah dana tahunan DKJ saja masih menyatakan belum tersedia dana atau pemikiran ke arah itu. Mungkin perlu diketahui bahwa Dewan Kesenian Jakarta dibiayai seratus persen oleh dana dari penghasilan propinsi DKI yang tentunya dipungut dari pajak rakyat DKI. Bahwa kebetulan di bidang seni rupa, teater, sastra, musik, tari, terkadang mengundang dari luar Jakarta, dan mendapat tanggapan positif dari propinsi lain, dan terkadang membiayainya sebagian atau dulu malah bisa sepenuhnya, itu soal lain lagi. Tetapi sialnya, karena sering mengundang luar Jakarta, dikira itu proyek nasional. Bukan DKJ persis dengan namanya, ialah proyek pemerintah propinsi DKI Jakarta untuk sektor kesenian. Itulah sebabnya terlalu berat jika harus menyusun Panitia Pengarah, Penyelenggara dan Dewan Penilai yang punya cakupan nasional. Dianjurkan si boleh saja. Tapi lebih tepat dianjurkan pada tokoh dan Pemerintah Republik Indonesia. Bukan tidak mampu pemikirannya. Tetapi pembiayaannya. Dan honorariumnya. Anggap saja usaha Pemerintah DKI dalam proyek kesenian ini sebagai test case atau cerminan yang bisa dilihat Pemerintah Republik untuk dikaji mungkin tidaknya jika dilahirkan Dewan yang Nasional levelnya.

Dalam omong santal dengan Gubernur DKI yang baru, memang dikemukakan apakah tidak mungkin itu dibina atau dibentuk Dewan Kesenian yang nasional jangkauannya. Dan coba dijajagi kemungkinannya dengan Direktorat Jendral Kebudayaan. Karena apa? Mungkin Gubernur melihat karena sudah lebih dari sepuluh tahun proyek kesenian itu muncul dalam level propinsi. Manfaatnya banyak. Dan mungkin kaget juga Gubernur karena DKJ untuk tahun anggaran 1983-1984 mengajukan mendekati Rp 300.000.000. Adalah hal yang sudah diberikan untuk tahun sebelumnya, namun untuk seluruh Pusat Kesenian Taman Is-

mail Marzuki yang meliputi Dewan Kesenian Jakarta, Akademi Jakarta, Institut Kesenian Jakarta dan lembaga eksekutifnya DKJ. Belum lagi mengurus yang lima gelanggang remaja di lima wilayah kewalikotaan. Belum Pusat Kesenian Kuningan dan Dinas Kebudayaannya. Itulah.

Untuk membentuk Dewan Kesenian yang punya level nasional, atau setidaknya kerjasama lebih erat lagi antar dewan kesenian daerah di seluruh Indonesia, bukan mustahil akan ditargetkan dalam pembicaraan pertemuan antar dewan yang mestinya berlangsung di Medan. Dan DKJ sesuai dengan keputusan Ujung Pandang memang diminta menjadi Panitia Pengarah. Tahulah nanti.

Biennale DKJ Yang Ketat
BIENNALE ke V DKJ memilih 19 orang pelukis yang serta. Memang mengagetkan apalagi jika dibanding dengan berturut-turut tahun 1974 (I) ialah 83 orang. Tahun 1976, 61 orang. Tahun 1978, 55 orang tidak tanggung-tahun 1980 ialah 95 orang ikut dalam biennale. Karena semua yang menyebut dirinya pelukis "terjaring" maka tidak ada apa. Tapi lihat saja dalam katalog tersebut, dan cocokkan dengan kenyataan. Berapa orang sebenarnya yang secara konsisten melukis dan berpameran. Dan bukan sekadar melukis karena diundang biennale. Lalu komparasikan mutunya dengan kawasan Asean atau internasional. Maka sekitar 20 atau 25 orang saja yang bisa bertahan. Bukan saja wawasan Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Tetapi juga wawasan panitia yang pernah terbentuk dan memilikinya. Tetapi apakah Komite Seni Rupa tidak memberikan kesempatan pada yang lainnya? Seperti tercantum dalam pengantar Katalog Biennale ke V, malah bisa memberikan kesempatan pameran tunggal sesuai dengan prosedur dan kriteria. Mungkin akan ditanya: Lha kriterianya siapa? Tentu saja kriteria DKJ. Dan jika yang menyelenggarakan Dewan Kesenian Yogyakarta, tentu juga kriteria mereka. Seorang pelukis yang kebetulan domisilinya di Jakarta dan mau mendaftar di Yogya, tentu tidak etis jika mendebat kriteria mereka.

Supaya tidak kabur, mengingat jumlah yang 83, 61, 55, 95 orang dan setiap orang cuma memasang dua karya, lantas karena ada predikat pasar seni, pesta seni, dan menuju kerangka berpikir untuk mengenal posisinya dalam dunia

internasional itulah maka Komite Seni Rupa DKJ melakukan seram-benahan sesuai dengan saran Dharta di bidang persyaratan peserta, jumlah karya dan kriteria. Agar kita para seniman Indonesia menyadari posisinya, dan kerja keras.

Sebab jika seniman Indonesia mulai baik karyanya, pasti bukan hanya terpasang di Balai Seni Rupa Jakarta saja, tetapi juga di Stedelykmuseum, Kroller-Muller, Wallraf-Richartz, Georges Pompidou, dsbnya. Mudah-mudahan maksud baik Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta dapat dipahami. Berakit-rakit ke hulu-lah....

Mengenal display karya yang kurang baik kami akui. Dan insya Allah diperbaiki untuk masa mendatang. Terimakasih.